RENCANA AKSI TAHUN 2023

BPPHLHK WILAYAH SULAWESI

GAKKUM

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Dodi Kurniawan, S. PT., M.H.

Kepala BPPHLHK Wilayah Sulawesi

Rencana Aksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2023 lingkup Program BPPHLHK Wilayah Sulawesi di dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi yang berlandaskan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2023, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah di tetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi di dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pada tahun-tahun selanjutnya.

Kepala Balai,

Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H.

PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi Tahun 2023 adalah dokumen yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi Wilayah Sulawesi.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2023 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan (*Road Map*) implementasi kegiatan lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi.

B. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan BPPHLHK Wilayah Sulawesi dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.905/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2021 tentang rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022;
- Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/PHLHK/SET.10/SET.1/11/2021 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.

Sesuai dengan perjanjian kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi TA 2023, telah disampaikan bahwa kinerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi adalah tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit pelaksana teknis BPPHLHK Wilayah Sulawesi. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kegiatan BPPHLHK Wilayah Sulawesi yang merupakan bagian dari sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tabel berikut:

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Program	Sasaran	Indikator	Target
1 – Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (029.FF)	Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	7 Operasi
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan	4 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang
2 - Kualitas Lingkungan Hidup (029.FD)	Terawasinya Usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundangan undangan terkait bidang LHK	Jumlah Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	87 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang
	Terselesaikannya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan P-21	Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	28 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang
3 – Dukungan Manajemen (029.WA)	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dilingkungan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis	1 Layanan
		Layanan Umum	1 Layanan

Adapun jumlah anggaran berdasarkan program BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (029.FF) : **Rp 3.400.000.000,-**
2. Kualitas Lingkungan Hidup (029.FD) : **Rp 10.946.423.000,-**
3. Dukungan Manajemen (029.WA) : **Rp 26.956.944.000,-**

Total : Rp 41.303.367.000,-

Tabel 2. Prognosis Capaian Kegiatan Per Triwulan BPPHLHK Wilayah Sulawesi TA 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target 2023	Satuan
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	2	2	2	1	7	Operasi
Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	1	1	1	1	4	Operasi
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	-	-	15	-	15	Orang
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	22	22	22	21	87	Badan Usaha
Peningkatan Kapasitas PPLH LHK	-	-	10	-	10	Orang
Kasus Tindak Pidana LHK P21	7	7	7	7	28	Perkara
Peningkatan Kapasitas PPNS	-	-	-	5	5	Orang
Layanan Perkantoran	-	-	-	1	1	Layanan
Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT	-	-	-	1	1	Layanan

PENUTUP

Tercapainya indikator kerja kegiatan BPPHLHK Wilayah Sulawesi didukung oleh kontribusi penuh dari para pelaksana di unit pelaksana teknis lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana dilingkungan BPPHLHK Wilayah Sulawesi serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Dengan disusunnya rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.